

PEMANFAATAN EKONOMI KREATIF RAJUTAN BENANG KASUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Oleh:

Samakmur

Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, IPTS

Email: mur1712@yahooo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan pemerintah dalam mengembangkan pengrajin rajutan benang kasur di desa Rumbio Kecamatan Panyabungan Utara dan Desa Sayur Maicat Kecamatan Kotanopan di Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui pengembangan pengrajin rajutan benang kasur dari aspek Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan Sumber Data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini, bersumber dari wawancara langsung dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak pemda, pembina PKK Kabupaten dan masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar wawancara, buku catatan, Pena, Kamera, Hanphone. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara 2) Pengamatan 3) Dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini dari beberapa yang telah diwawancarai tersebut dari kalangan stakeholder yaitu 1) Pelatihan Usaha yang didalamnya Masyarakat diberikan pelatihan dalam bentuk kerajinan rajutan benang kasur 2) Permodalan dan peralatan yang telah ditanggung oleh pemerintah daerah Mandailing Natal 3) Cendekiawan (*Intellectuals*), berperan sebagai agen yang menyebarkan & mengimplementasikan ilmu pengetahuan, sdnan teknologi 4) Pemerintah (*Government*), sebagai organisasi Pemerintah daerah yang pelaksanaan tugasnya dibagi kepada dinas dan badan dalam mengembangkan sentral-sentral ekonomi dan pembinaannya yang berkelanjutan. Kesimpulan pelatihan rajutan benang kasur motif mandailing telah berjalan dengan baik dan dibutuhkan pembinaan secara berkelanjutan dan adanya koordinasi antar pemda, masyarakat serta dunia usaha.

Kata Kunci: *Ekonomi Kreatif, Rajutan Benang kasur, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*

Abstract

This study aims to find out the government's guidance in developing mattress yarn knit craftsmen in Rumbio Village, Panyabungan North Village and Sayur Maicat Village in Kotanopan District in Mandailing Natal Regency and to find out the development of mattress thread knitted craftsmen from the aspect of community empowerment in increasing the income of the people in Mandailing Natal District. This study uses qualitative research with data sources including primary data and secondary data. Primary data in this study, sourced from direct interviews and in-depth interviews with local governments, district PKK coaches and the community. The instruments used in this study are interview lists, notebooks, pens, cameras, cellphones. While the techniques used in this study are: 1) Interview 2) Observation 3) Documentation. As for the results of this study, some of the interviewees were from stakeholders, namely 1) Business Training in which the Community was given training in the form of mattress thread knitted craft 2) Capital and equipment that was borne by the Mandailing Natal regional government 3) Intellectuals, played a role as an agent who disseminates & implements science, art and technology 4) Government (Government), as the implementation of local government organizations the tasks are shared with the agencies and agencies in developing economic centers and their ongoing coaching The conclusion of mandailing mattress knitted training training has been running properly and needed sustainable development and coordination between local governments, communities and businesses.

Keywords: *Creative Economy, Knitted Mattress Yarn, Increase Community Income*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan tidak dapat berjalan dengan berkelanjutan hanya mengandalkan bidang industri sebagai sumber ekonomi, tetapi wajib lebih mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif karena kreativitas manusia itu berasal dari daya pikirnya yang menjadi modal dasar untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan,

bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan bakunya atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasis inovasi, kreativitas dan imajinasi.

Ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, engineering, dan ilmu telekomunikasi.

Ekonomi kreatif didasarkan kepada pertama Kreativitas (Creativity) sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbedanya yang sudah ada (*thinking out of the box*). Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu, bisa menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri beserta orang lain. Kedua Inovasi (*Innovation*) Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Penemuan (*Invention*) Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya.

Istilah Ekonomi Kreatif mulai dikenalkan oleh John Howkins menulis buku "Creative Economy, How People Make Money from Ideas". Howkins mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah Gagasan. Atau dalam satu kalimat yang singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Maka dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi. Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh Kabupaten Mandailing Natal adalah ekonomi yang berkelanjutan mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap kondisi geografi dan tantangan globalisasi, yang pada akhirnya menghasilkan keberlanjutan pertumbuhan (*sustainable growth*). Pertumbuhan yang tinggi tercermin dari kompetensi individu-individu dalam menciptakan inovasi.

Ekonomi Kreatif yang di dalamnya terdapat industri-Industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas (*creative capital*) yang mereka gunakan untuk menciptakan Inovasi. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian yaitu 1) Bagaimanakah pembinaan pemerintah dalam mengembangkan pengrajin rajutan benang kasur di Kabupaten Mandailing Natal 2) Bagaimanakah mengembangkan

pengrajin rajutan benang kasur dari aspek Bauran pemasaran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kabupaten Mandailing Natal. Dengan tujuan untuk mengetahui pembinaan pemerintah dalam mengembangkan pengrajin rajutan benang kasur di Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui pengembangan pengrajin rajutan benang kasur dari aspek Bauran pemasaran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Chambers yang dikutip dari buku Zubaedi, Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "people-Centered", Participatory, Empowering, And Sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut.

Menurut Jim Ife yang dikutip dari buku yang sama, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni, konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu, perspektif Pluralis, Elitis, Strukturalis, dan *Post-Strukturalis*:

- Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *Pluralis* adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain.
- Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *Elitis* adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan lain-lain.
- Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *Struktural* adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminasi. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif *Post-Strukturalis* adalah proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektual ketimbang aktivitas, aksi atau praktis.

B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain untuk melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain, sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Sedangkan menurut Rappaport yang di kutip dari buku Oos M, menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan memiliki makna dorong atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Dalam pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada asil, namun pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up*, dengan cara mengenali potensi masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Dalam hal ini, Dubois dan Miley menjelaskan tiga cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan, respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pihak dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasamaklien.
- b. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman inividu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien.

- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek peroses pemecahan masalah, menghargai hak hak klien, merangkai tangan tangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien/ sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.

C. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amal zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *Good Government* sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Good government adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan yang mereka lakukan tersebut.

Bentuk-bentuk motifasi moril itu adalah:

- a. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan inisetiap pesertadiberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan actual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan taknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut didunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadidalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus di jalankan, sehingga

dapat dihindari sekecil mungkin dan yakegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

b. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun Dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, seringkali bank tidak akan memberikan pinjaman. Osi, lokasi, orang/SDM, lingkungan fisik, dan proses.

D. Ekonomi Kreatif

Istilah Ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2007) Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berdasarkan inovasi, kreativitas dan imajinasi.

Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan.

- a. Kreativitas (*Creativity*) Dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, *fresh*, dan dapat diterima umum.
- b. Inovasi (*Innovation*) Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat.
- c. Penemuan (*Invention*) Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya.

E. Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif sering dilihat sebagai sebuah konsep yang memayungi juga konsep lain yang populer di awal abad ke-21 ini, yaitu Industri

Kreatif. Industri kreatif sendiri sebenarnya merupakan sebuah konsep yang telah muncul lebih dahulu sebelum munculnya konsep ekonomi kreatif. Tercatat istilah "industri kreatif" sudah muncul pada tahun 1994 dalam Laporan "*Creative Nation*" yang dikeluarkan Australia. Namun istilah ini benar-benar mulai terangkat pada tahun 1997 ketika *Department of Culture, Media, and Sport (DCMS) United Kingdom* mendirikan *Creative Industries Task Force*. Definisi industri kreatif menurut *Creative Industries Task Force*, adalah "*Creative Industries are those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content*".

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 15 subsektor, antara lain: a. Periklanan, Arsitektur, Pasar Barang Seni, Kerajinan, Desain, Fesyen (*fashion*) Video, Film dan Fotografi, Permainan Interaktif, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*) atau Teknologi Informasi, Televisi & Radio, Riset dan Pengembangan, Kuliner

Seperti halnya sebuah rumah yang membutuhkan pilar untuk bisa tetap berdiri tegak, ekonomi kreatif memiliki 5 pilar yang perlu terus diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi ekonomi kreatif Indonesia 2025. Kelima pilar ekonomi kreatif tersebut dapat a) Sumber Daya (*Resources*) b) Industri (*Industry*) c) Teknologi (*Technology*) d) Institusi (*Institution*) e) Lembaga Keuangan (*Financial Institution*).

F. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif

Peran utama Pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah:

- a. Katalisator, fasilitator dan advokasi, yang memberi rangsangan, tantangan, dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi.
- b. Regulator yang menghasilkan, Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, sumber daya, dan teknologi. Pemerintah dapat mempercepat perkembangan industri kreatif jika pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif. Pemerintah juga harus mengatur bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan dijalankan dengan baik.
- c. Konsumen, investor bahkan *entrepreneur*.

Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk menjadi produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi

infrastruktur industri. Sebagai konsumen, pemerintah perlu merevitalisasi kebijakan *Procurement* yang dimiliki, dengan prioritas penggunaan produk-produk kreatif. Sebagai *entrepreneur*, pemerintah secara tidak langsung memiliki otoritas terhadap badan usaha milik pemerintah (BUMN).

d. *Urban planner*

Kreativitas tumbuh dengan subur di Kota yang memiliki iklim kreatif. Agar pengembangan ekonomi kreatif ini berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan kota-kota kreatif di Indonesia. Pemerintah memiliki peran sentral dalam penciptaan Kota kreatif (*Creative City*), yang mampu mengakumulasi dan mengkonsentrasikan energi dari individu-individu kreatif menjadi magnet yang menarik minat individu/perusahaan untuk membuka usaha di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Rumbio Kec. Panyabungan Utara dan Desa Sayur Maicat Kec. Kota Nopan Kabupaten Madian. Pemilihan lokasi penelitian menggunakan metodologi penelitian secara sengaja (*Purposive*). Waktu penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi tiga tahap: 1) Tahap persiapan: tahap ini meliputi pengajuan judul dan pembuatan proposal; 2) Tahap penelitian: tahap ini semua kegiatan yang berlangsung di lapangan (pengambilan data); 3) Tahap penyelesaian: tahap ini adalah kegiatan analisis dan penyusunan laporan.

Jenis Penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menguraikan secara mendalam tentang apa yang diperoleh dari orang lain, baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan juga dengan berusaha memahami objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan tanpa bermaksud memanipulasi.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini, bersumber dari wawancara langsung dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan pihak pemda, pembina PKK Kabupaten dan masyarakat. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi data seperti, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga melalui kerajinan rajutan benang kasur, perkembangan perekonomian ibu rumah tangga dan pemasaran hasil rajutan benang kasur. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah profil kelurahan perjuangan kecamatan Teluknibung, serta buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diteliti, studi literatur yang berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian dan artikel yang berasal dari media cetak dan internet.

Dalam melakukan penelitian instrument sangatlah diperlukan, instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar wawancara, buku catatan, Pena, Kamera, Handphone. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara (*Interview*) 2) Pengamatan (Observasi) 3) Dokumentasi. Informan Penelitian yaitu: Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Madina, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kab. Madina, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madina, Toko penjual sevenir khas Madina, Masyarakat Kabupaten Madina. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data kualitatif dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari bersifat khusus ke umum. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

4. PEMBAHASAN

Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 1992, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Sumatera Utara memutuskan pemekaran wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara. Prioritas utama pemekaran wilayah itu adalah pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal dengan ibukota Panyabungan ini memiliki luas wilayah $\pm 6.620,70 \text{ Km}^2$ (662.069,99 Ha, luas berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014) atau setara dengan 9,24% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Muara Batang Gadis memiliki wilayah yang paling luas yakni 143.502,00 Ha (21,67%), sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki wilayah yang paling kecil yakni 3.472,57 Ha (0,52%).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Visi yang ditawarkan untuk pembangunan Kabupaten Mandailing Natal 2016-2021, adalah: **“Mandailing Natal Yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Sehat, Cerdas, Didukung Sarana Prasarana, Infrastruktur Yang Kuat, Masyarakat Religius dan Berbudaya Serta Berkelanjutan”**.

Landasan mewujudkan visi tersebut tertuang dalam misi Kabupaten Mandailing Natal yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

5. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana, infrastruktur, permukiman dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
7. Melestarikan adat dan budaya daerah.
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi.
9. Mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal sampai tahun 2015 adalah sebesar 430.894 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Panyabungan dengan jumlah 82.468 jiwa atau 19,14% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dapat dimaklumi karena Kecamatan Panyabungan terletak di ibukota Kabupaten Mandailing Natal.

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebesar 211.506 jiwa dan perempuan sebesar 219,388 jiwa dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 96,41 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dimana terjadinya penurunan dari 49.050 jiwa pada tahun 2011 menjadi 47.790 jiwa pada tahun 2015, atau mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari 11,98% pada Tahun 2011 menjadi 11,09% pada tahun 2015.

1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2015, telah terjadi peningkatan persentase koperasi aktif dari 40,08% pada tahun 2011 menjadi 40,63% pada tahun 2012, kemudian menjadi 42,41% pada Tahun 2013, menurun menjadi 41,91% pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi 42,65% pada Tahun 2015.

Selain koperasi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Mandailing Natal juga mengalami kemajuan, dimana dari 5 Unit BPR dan LKM pada Tahun 2011 menjadi 6 unit pada tahun 2012 dan tahun 2013, 7 Unit BPR dan LKM pada Tahun 2014 dan tahun 2015.

Dalam hal ini peneliti memaparkan temuan-temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini ada 3 poin dari permasalahan peneliti yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan beberapa informasi tentang pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Madina. Pengembangan ekonomi kreatif sangat baik

dilakukan oleh Badan sudah cukup baik dilakukan dan Kepala Badan selaku penanggung jawab kedinasan langsung turut serta dalam acara pelaksanaan kegiatan pelatihan rajutan benang kasur yang diadakan di desa sayur maicat

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Balitbangda KabupatenMandailing Natal menitik beratkan programnya melalui peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Inovasi melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan serta kegiatan Inovasi dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Madina dan hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Bupati Kabupaten Madina selaku Tim Pembina PKK Kabupaten Madina pada acara pembukaan pelatihan rajutan benang kasur didesa sayur maicat

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Bupati dapat dijabarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Madina memang sangat proaktif didalam pembinaan peningkatan usaha keluarga dan ini terlihat pada acara pembukaan pelatihan didesa sayur maicat ,Ibu Bupati langsung hadir dan memberikan motivasi kepada peserta pada kata sambutan .

Dari wawancara dengan ibu kabid inovasi dapat dijabarkan bahwa kegiatan pelatihan dilakukan pada dua lokasi dan tutornya dari Medan dan ini menggambarkan keseriusan dan badan penelitian dan pengembangan madina memang benar-benar serius untuk mengembangkan inovasi baru yang mendukung pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat dipaparkan kedalam bagian-bagian yaitu:

1) Pelatihan Usaha

Masyarakat diberikan pelatihan dalam bentuk kerajinan rajutan benang kasur dan dilokasikan pada satu tempat peratan pelatihan berupa media belajar dan intruktur didatangkan dan Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman dan praktek pembuatan rajutan benang kasur ada yang berbentuk dompet,tas, sepatu dan jenis lain . Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi berwirausaha dalam usaha kerajinan rajutan benang kasur. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih sistimatis dan berjenjang yaitu dengan dasar, terampil, mahir dan terlihat pada pelaksanaan pelatihan hasil produk yang dihasilkan sangat perlu diadakan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus dijalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

2) Permodalan dan peralatan.

Permodalan dan peralatan sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha tetapi bukan yang terpenting untuk

mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dan peralatan sebaiknya diberikan bukan untuk modal dan peralatan awal tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik dibutuhkan partisipasi dan kemauan semangat dari calon wirausaha untuk mendahulukannya berupa modal dan peralatan bantuan dari pihak pemerintah hanya berupa pancingan dan pengembangan.

3) Cendekiawan (*Intellectuals*)

Cendekiawan disini memiliki peran sebagai sebagai agen yang menyebarkan & mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industri kreatif dalam masyarakat.

4) Pemerintah (*Government*)

Pemerintah didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki kuasa untuk mengelola suatu negara, sebagai sebuah kesatuan politik, atau aparat atau alat Negara yang memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas/kekuasaan. Pemerintah daerah yang pelaksanaan tugasnya dibagi kepada dinas dan badan sebaiknya bersinergi dalam mengembangkan sentra sentra ekonomi dan pembinaannya terus berkelanjutan.

5. KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan pemerintah dalam mengembangkan pengrajin rajutan benang kasur di Kabupaten Mandailing Natal sangat baik adanya kolaborasi antara Dinas dengan Badan serta aparat di kecamatan, kelurahan.
2. Pengembangan pengrajin rajutan benang kasur dari aspek pembinaan dilakukan dengan pola pelatihan usaha dalam meningkatkan keterampilan dan jiwa usaha.

5.2 Saran

Sebaiknya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal melakukan koordinasi lebih optimal lagi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara dan juga Kemenristekdikti untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan baik dari segi dana maupun peningkatan SDM. Meningkatkan koordinasi kepada Badan dan dinas yang menangani pengembangan ekonomi. Pelatihan yang dilaksanakan sudah bagus lebih bagus dan tepat sasaran adalah jika yang dilatih sudah tingkat mahir dari tingkat tersebut baru dikembangkan biar bisa menjadi nilai tambah melalui inovasi dan kreatifitas. Badan Penelitian dan Pengembangan bekerja sama dengan Dinas Prindustri dan Perdagangan lebih mendorong kerjasama dengan swalayan maupun toko retail agar dapat memfasilitasi pelaku usaha agar

memasukkan produk-produk usaha kecil menengah dalam rangka membantu meminimalis biaya promosi pelaku usaha.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alma. Buchari. 2007. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Edisi Revisi, Bandung: CV. Alfabeta.
- Hasan. M. Iqbal . 2002. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartajaya. Hermawan. 1996. *Marketing Plus 2000, Siasat Memenangkan Persaingan Global*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Perdagangan R.I, 2008. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*.
- Ma'aruf. Hendri. 2005. *Pemasaran Ritel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari. Fitria. dkk. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen pada Minimarket*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya
- Sidauruk. Rosmawaty. 2013. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jurnal Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif*. Jawa Barat.
- Simamora. Bilson. 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Surabaya: Pustaka Utama.
- Swastha. Bas. dkk. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Padangsidimpuan : BPFE.
- Thamrin. Abdullah. dkk. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono. Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Padangsidimpuan : Penerbit Andi.
- , 2010. *Laporan Pengembangan Ekonomi Kreatif*.